

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan mengenai laporan keuangan agar tercipta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang benar. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang bertujuan agar pemerintahan pusat maupun daerah, dapat memberikan bentuk pertanggungjawabannya berupa laporan keuangan.

Untuk membuat laporan keuangan yang baik dan benar, pemerintah menetapkan SAP, yaitu Standar Akuntansi Pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah yang mengatur bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk menyusun laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan :

#### **a. Transparansi**

Transparansi dapat diartikan sebagai memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah

dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang–undangan

b. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik

c. Manajemen

Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

d. Keseimbangan Antargenerasi

Mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan diasumsikan apakah generasi mendatang menanggung beban pengeluaran tersebut.

Menurut Badjuri dan Trihapsari dalam Tantriani Sukmaningrum (2012,18), tujuan penting reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik adalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Hal – hal yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan yaitu laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

BPK sebagai suatu lembaga untuk memeriksa laporan keuangan, melakukan kegiatan untuk mendukung terwujudnya akuntabilitas pelaporan keuangan meliputi antara lain:

1. Kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan
2. Review laporan keuangan pemda sebelum diaudit oleh BPK
3. Menindaklanjuti hasil temuan BPK
4. Pendampingan perbaikan sistem pelaporan
5. Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
6. Sosialisasi, pembentukan satgas, dan workshop SPIP dan
7. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pengelolaan keuangan Daerah

Laporan keuangan yang telah dibuat harus diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sebagai lembaga pemeriksaan ekstern yang kuat dan mandiri, sebelum disampaikan pada badan legislatif (DPR/Dewan Perwakilan Rakyat). Pemeriksaan oleh BPK bermaksud untuk pemberian pendapat (opini). Sebagaimana diketahui dasar hukum pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diatur dalam undang-undang No. 15 tahun 2004. Pasal 2 dari undang-undang No. 15 tahun 2004 menyatakan :

1. Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara
2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Data yang diperoleh dari [www. bpk. go. id](http://www.bpk.go.id) pada IHPS I Tahun 2012 memuat:

- (1) hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2012;
- (2) hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
- (3) hasil pemantauan penyelesaian kerugian Negara/Daerah.

Hasil pemeriksaan BPK RI pada Semester I lebih banyak memuat pemeriksaan laporan keuangan pemerintah, selain memuat pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Objek pemeriksaan BPK pada Semester I Tahun 2012 berjumlah 622 objek, meliputi entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, serta lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara.

Temuan pemeriksaan BPK dalam Semester I Tahun 2012 meliputi 13.105 kasus senilai Rp. 12,48 triliun. Dari jumlah tersebut, 3.976 kasus senilai Rp. 8,92 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan. Sisanya merupakan kasus penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan, serta kelemahan sistem pengendalian intern (SPI). Dari temuan senilai Rp. 8,92 triliun tersebut, telah ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas Negara/daerah/perusahaan senilai Rp. 311,34 miliar.

Pemeriksaan Keuangan dilakukan atas 527 laporan keuangan entitas, yang meliputi 91 laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP), 430 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), dan 6 laporan keuangan BUMN dan badan lainnya.

Hasil pemeriksaan keuangan menunjukkan peningkatan jumlah laporan keuangan yang memperoleh opini “wajar tanpa pengecualian” (WTP).

Di dalam pemeriksaan keuangan, BPK RI juga menemukan adanya 5.036 kasus kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan 6.904 kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp7,00 triliun. Selama proses pemeriksaan keuangan, entitas telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan dengan penyetoran ke kas Negara/daerah/perusahaan dan/atau penyerahan aset senilai Rp. 253,19 miliar.

Pemeriksaan Kinerja dilakukan atas 14 objek pemeriksaan, terdiri atas 9 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, 1 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah, 3 objek pemeriksaan di lingkungan BUMN, dan 1 objek pemeriksaan di lingkungan BUMD. Hasil pemeriksaan kinerja mengungkapkan 80 kasus ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp125,43 miliar dan 104 kasus kelemahan SPI dan 11 kasus yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp. 86,47 miliar. Entitas telah menindak lanjuti temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan indikasi kerugian dan potensi kerugian dengan penyetoran ke kas negara dan/atau penyerahan aset senilai Rp. 50,98 miliar.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dilakukan atas 81 objek pemeriksaan pada 62 entitas. Entitas tersebut terdiri atas 37 objek pemeriksaan

pada 23 entitas di lingkungan pemerintah pusat, 24 objek pemeriksaan pada 20 entitas di lingkungan pemerintah daerah, 18 objek pemeriksaan pada 17 entitas di lingkungan BUMN, dan 2 objek pemeriksaan pada 2 entitas di lingkungan BUMD. Hasil PDTT mengungkapkan adanya 252 kasus kelemahan SPI dan 702 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp. 5,26 triliun, diantaranya sebanyak 422 kasus merupakan temuan berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp. 3,62 triliun. Selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan penyetoran ke kas Negara/daerah/perusahaan dan/atau penyerahan aset senilai Rp. 7,16 miliar.

Hasil pemeriksaan signifikan selama Semester I Tahun 2012 yang perlu mendapatkan perhatian para pemangku kepentingan terdiri dari :

1. Adanya kerugian Negara/daerah akibat penyimpangan perjalanan dinas di pemerintah pusat dan daerah periode Semester I Tahun 2012 sebanyak 259 kasus senilai Rp. 77,00 miliar, yang meliputi perjalanan dinas fiktif sebanyak 86 kasus senilai Rp. 40,13 miliar dan perjalanan dinas ganda dan/atau perjalanan dinas melebihi standar yang ditetapkan sebanyak 173 kasus senilai Rp. 36,87 miliar
2. Pelaksanaan Program Penerbitan (Nomor Induk Kependudukan) NIK Nasional dan Penerapan KTP elektronik Berbasis NIK Nasional Tahun 2011 belum efektif dan pelaksanaan pengadaan KTP elektronik belum sepenuhnya mematuhi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Terhadap kedua

program kependudukan dan catatan sipil tersebut, hasil pemeriksaan mengungkapkan temuan ketidak efektifan sebanyak 16 kasus senilai Rp. 6,03 miliar, ketidak hematan sebanyak 3 kasus senilai Rp. 605,84 juta, dan ketidak patuhan yang mengakibatkan indikasi kerugian negara sebanyak 5 kasus senilai Rp. 36,41 miliar, dan potensi kerugian negara sebanyak 3 kasus senilai Rp. 28,90 miliar. Atas indikasi kerugian negara dan potensi kerugian negara tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara senilai Rp. 50,98 miliar.

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan menunjukkan bahwa dari sebanyak 183.862 rekomendasi senilai Rp. 80,97 triliun dalam hasil pemeriksaan tahun 2008 sampai dengan Semester I Tahun 2012, sebanyak 94.689 rekomendasi senilai Rp. 31,53 triliun telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi. Sebanyak 43.297 rekomendasi senilai Rp. 26,30 triliun ditindaklanjuti belum sesuai dengan rekomendasi atau dalam proses tindak lanjut, sebanyak 45.715 rekomendasi senilai Rp. 22,81 triliun belum ditindak lanjuti, dan sebanyak 161 rekomendasi senilai Rp. 337,85 miliar tidak ditindaklanjuti. Entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK Tahun 2008 sampai dengan Semester I Tahun 2012 dengan penyetoran ke kas Negara/ daerah/perusahaan/perusahaan dan/atau penyerahan aset senilai Rp. 16,90 triliun.

Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah menunjukkan dari sebanyak 16.883 kasus senilai Rp. 4,64 triliun periode akhir Tahun 2003 sampai dengan Semester I Tahun 2012 telah dilakukan penyelesaian berupa angsuran sebanyak 4.419 kasus senilai Rp. 564,80 miliar, pelunasan sebanyak 6.812 kasus

senilai Rp. 735,60 miliar serta penghapusan sebanyak 125 kasus senilai Rp. 12,44 miliar. Sisa kasus kerugian Negara/daerah pada akhir Semester I Tahun 2012 sebanyak 9.946 kasus senilai Rp. 3,32 triliun. Hasil pemantauan penyelesaian kerugian Negara/daerah pada Semester I Tahun 2012 menunjukkan bahwa jumlah kasus kerugian Negara/daerah sebanyak 105 kasus senilai Rp. 253,28 miliar dengan penyelesaian berupa angsuran sebanyak 18 kasus senilai Rp. 8,90 miliar, dan pelunasan sebanyak 18 kasus senilai Rp. 1,05 miliar. Sisa kasus kerugian Negara/daerah akhir Semester I Tahun 2012 yaitu sebanyak 87 kasus senilai Rp. 243,33 miliar.

Pemantauan terhadap hasil pemeriksaan BPK berindikasi tindak pidana korupsi yang disampaikan kepada instansi yang berwenang (aparat penegak hukum) menunjukkan bahwa sejak Tahun 2003 s/d. akhir Tahun 2012, jumlah temuan BPK berindikasi tindak pidana yang telah disampaikan kepada instansi berwenang adalah sebanyak 319 temuan senilai Rp. 34,06 triliun. Dari jumlah tersebut, BPK telah menyampaikan kepada Kepolisian sebanyak 37 temuan, Kejaksaan sebanyak 174 temuan, dan KPK sebanyak 108 temuan. Sisa kasus yang belum ditindaklanjuti atau belum ada informasi mengenai tindak lanjutnya dari instansi yang berwenang sebanyak 133 temuan.



**Tabel 1.1**  
**PERKEMBANGAN OPINI LKPD**  
**TAHUN 2009 – 2011**  
**Pada Pemerintah Kabupaten**

LKPD Pembkab	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
Tahun 2009	7	2%	240	63	37	10	95	25	379
Tahun 2010	16	4%	252	64	23	16	107	26	398
Tahun 2011	36	12	240	76	4	1	33	11	313

Sumber : [www. bpk. go. id](http://www.bpk.go.id) (2012)

BPK menemukan beberapa kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas:

1. Pencatatan tidak/belum dilakukan secara akurat
2. Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan
3. Terlambat menyampaikan laporan
4. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai
5. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah banyak yang masih belum memenuhi kriteria kualitas informasi yang disyaratkan.

Dari dua belas (12) Kabupaten di Riau, Kuantan Singingi menjadi daerah pertama yang sukses mempertahankan opini WTP dari BPK RI. Tahun 2012, Kuantan Singingi menjadi Kabupaten pertama yang meraih opini WTP atas LKPD tahun anggaran 2011. Kemudian pada tahun 2013, Kuantan Singingi kembali memperoleh opini WTP untuk tahun anggaran 2012. Kabupaten

Pelalawan, Bengkalis, Siak, Meranti, dan Dumai juga mendapat opini WTP untuk tahun anggaran 2012. Namun opini WTP yang diperoleh daerah lain tidak tetap, dan Kuantan Singingi mampu mempertahankan opini WTP yang diperoleh selama dua tahun berturut-turut. Oleh karena itu peneliti mengambil daerah Kuantan Singingi untuk meneliti **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Apakah faktor – faktor yang mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini :

1. Untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam peningkatan Kualitas Informasi Laporan Keuangan

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian yang diharapkan dengan dilaksanakannya penelitian ini antara lain :

1. Bagi pemerintah daerah agar dapat menyusun laporan keuangan daerah sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah
2. Bagi akademis dapat menjadi pertimbangan dan literatur untuk penelitian berikutnya
3. Dapat menambah pengetahuan tentang kualitas laporan keuangan.

### **1.5 Batasan Masalah**

Karena keterbatasan waktu dan jarak daerah yang cukup jauh, maka penelitian terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diarahkan kepada Dinas–Dinas dan Badan-Badan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, agar lebih efektif dan efisien.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari tiga bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **Bab I PENDAHULUAN**

Merupakan bagian pendahuluan. Bab ini menjelaskan latar belakang yang mendasari munculnya permasalahan dalam penelitian, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bagian tinjauan pustaka, berisi teori-teori yang melandasi penelitian ini dan menjadi dasar acuan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Membahas mengenai metode penelitian yang menjelaskan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, metode penelitian, metode pengambilan sampel, jenis data yang digunakan beserta sumbernya, teknik pengambilan data, dan metode analisis yang digunakan untuk menganalisis hasil pengujian sampel.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Merupakan bagian pembahasan, yang berisi tentang pengujian atas hipotesis yang dibuat dan penyajian hasil dari pengujian tersebut, serta pembahasan tentang hasil analisis yang dikaitkan dengan teori yang berlaku.

**Bab V PENUTUP**

Merupakan bagian penutup, yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian serta saran bagi penelitian berikutnya.